

SKRIPSI



**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BERSYARAT**

(Studi kasus RUTAN Klas IIB Makale)

**OLEH
ARDY KURNIAWAN BOMBING
B 111 08 799**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
M A K A S S A R
2013**

HALAMAN JUDUL

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PEMBEBASAN

BERSYARAT

(Studi kasus Rutan Klas IIB Makale)

Oleh :

ARDY KURNIAWAN BOMBING

B111 08 799

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian
Studi Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana
Program studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi kasus Rutan Klas IIB Makale)

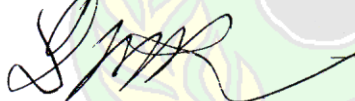
Disusun dan diajukan oleh

**ARDY KURNIAWAN BOMBING
B111 08 799**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 21 Agustus 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



H.M. Imran Arief, S.H., M.H.
NIP. 19470915 197901 1 001

Sekretaris



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa

Nama : Ardy Kurniawan Bombing
Nomor Induk : B111 08 799
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan
Pembebasan Bersyarat (Studi kasus
RUTAN Klas IIB Makale).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

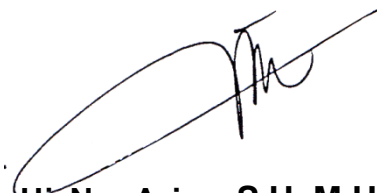
Makassar, Agustus 2013

Pembimbing I,



H.M.Imran Arief, S.H.,M.H.
NIP 19470915 197901 1 001

Pembimbing II,



Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ARDY KURNIAWAN BOMBING**
No. Pokok : **B 111 08 818**
B a g i a n : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan
Prmbebasan Bersyarat (studi kasus RUTAN
Klas IIB Makale).**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2013

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Ardy Kurniawan Bombing (BIII 08 799), Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus RUTAN Klas IIB Makale) dibimbing oleh Bapak H.M. Imran Arief sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa sebagai pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan di RUTAN Klas IIB Makale. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan pembebasan bersyarat, penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencatat arsip-arsip, dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pembebasan bersyarat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana di RUTAN Klas IIB Makale.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat adalah pembebasan narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Tujuan pembebasan bersyarat adalah untuk mempersiapkan diri kembali ditegah-tegah masyarakat setelah bebas.

Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat di RUTAN Klas IIB Makale dipengaruhi oleh faktor penghambat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah terlalu banyaknya persyaratan administrasi dan tumpang tindihnya persyaratan, tidak adanya pihak keluarga yang menjamin, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap warga binaan, sehingga pihak pemerintah setempat terkadang menolak warga binaan untuk melakukan pembebasan bersyarat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji syukur kepada **Tuhan Yang Maha Esa**, dimana berkat limpahan rahmat, karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Prmbebasan Bersyarat (studi kasus RUTAN Klas IIB Makale)”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebuah kelegaan, karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penuh ikhlas penulis memberikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya, yang pertama kepada **Tuhan Yang Maha Esa**, sang penguasa tunggal atas

langit-bumi dan isinya. Kemudian dengan rasa rendah hati dan rasa hormat yang sangat tinggi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, **Yance bombing,S.H.,M.H.** dan **Alfrida Dama,S.km.**selama ini telah banyak berkorban baik materi maupun energi. Serta keluarga besar penulis yang selalu berdoa yang terbaik buat penulis.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari bapak **H.M. Imran Arief,S.H.,M.H** selaku pembimbing I skripsi dan **Hj.Nur Azisa,S.H.,M.H** selaku pembimbing II skripsi yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun, serta optimisme kepada penulis dan akan selalu penulis ingat. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penulis berikan kepada Yth:

1. Bapak Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak .Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr.Ir.Abrar Saleng, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik., Bapak Dr.Anshori Ilyas, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Romi Librayanto,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof.Dr.Andi Sofyan,S.H.,M.H., Abd. Asis,S.H.,M.H., dan Kaisaruddin K,S.H.,M.H. yang telah berperan sebagai penguji skripsi ini ditengah kesibukan beliau.
5. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepala Rutanklas II B Makale beserta jajarannya
6. Para dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Pihak Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas.
8. Para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Ramalang, Pak Bunga, Pak Usman, Ibu Sri, Kak Lina, Kak Tri, Ibu Ida, Ibu Haji, Pak Sardi, Pak Roni dan seluruh Staf Akademik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Keluarga besar PMK FH-UH yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- 10.Sahabat-sahabat di “DLF” Alim Bachri,S.H., Muhammad Hidayat,S.H., Nurman,S.H., Joxi,S.H., Andi Purnama Sari, S.H, Muhammad Saiful, Rafiuddin, Abdul Hafid, Abdul Kadir, Yudi Kiswanto, Norman Bryan, Natas George Bulu, Adlyanus Mambela,

Bayu Nugraha Lazuardi, Aswar Amir, Muhammad Rahmad, Muhammad Agus, Andi Gunawan Agus, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

11. Sahabat KKN Gel.82 Tahun 2012 di Kec.Rampunan

12. Keluarga besar mahasiswa fakultas hukum angkatan 2008 tanpa terkecuali.

Serta seluruh pihak yang telah mendoakan dan membuat perjalanan hidup penulis selama kuliah menjadi penuh warna dan penuh arti dan banyak menciptakan kisah yang akan penulis jadikan kisah klasik yang tak lekang oleh waktu.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan makna positif bagi kita semua terutama mahasiswa FH-UH (Fakultas Hukum-Universitas Hasanuddin) dan perkembangan ilmu Hukum. Amin

Makassar, Agustus 2013

Ardy Kurniawan Bombing

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pemidanaan	7
1. Tujuan Pemidanaan.....	7
2. Teori Pemidanaan	10
B. Narapidana.....	17
1. Pengertian Narapidana	17
2. Hak-Hak Narapidana	18
C. Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat	19
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	19
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat.....	19
3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat.....	23
D. Rumah Tahanan Negara (RUTAN).....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	30
B. Teknik Pengumpulan Data	30
C. Jenis Dan Sumber Data.....	31
D. Analisis Data.....	31

BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Rumah Tahanan Klas IIB Makale.....	32
B. Proses Pengusulan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana	34
C. Pelaksanaan Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Makale	42
D. Faktor-Faktor yang Menghambat Dalam Pemberian Pembebasan Di Rumah Tahanan Klas IIB Makale	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun untuk menakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi

anggota masyarakat yang baik dan berguna, sehingga dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembinaan di Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disingkat RUTAN) dan di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) merupakan sistem pemenjaraan yang pada awalnya menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, namun sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan), menyatakan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Penghukuman bukan hanya untuk melindungi masyarakat semata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi disebut penjahat, melainkan orang yang tersesat. Seseorang yang tersesat dapat bertaubat, dan ada harapan berhasil dibina dengan sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan

terhadap para pelanggar hukum bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan/Narapidana dengan masyarakat. Narapidana adalah anggota masyarakat yang karena kesalahannya telah melanggar hukum dan nantinya apabila telah selesai menjalani pidananya akan menjadi anggota masyarakat.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Rutan/Lapas sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di Rutan/Lapas.

UU Pemasyarakatan menjamin hak-hak Narapidana yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 yang berbunyi bahwa:

“Warga binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga serta Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hak-hak yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut di atas diberikan terhadap para narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Dalam pembinaan narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya.

Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya. Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan latar belakang di atas maka penulis membuat suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat” (Studi Kasus di Rumah Tahanan Klas IIB Makale).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemenuhan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam pemenuhan hak mendapatkan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale?

C. Tujuan penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemenuhan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Rutan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pemenuhan hak mendapatkan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan praktis

Menambah wawasan masyarakat tentang Pembebasan Bersyarat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan narapidana di luar RUTAN, dapat menjadi masukan kepada pelaksana pemberian Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat terutama untuk membentuk sikap yang lebih baik, dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Dan Pemidanaan

1. Tujuan Pemidanaan

Sebelum membahas mengenai tujuan pemidanaan, Penulis akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian pemidanaan itu sendiri.

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit berkaitan dengan hukum pidana.

Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi upaya refresif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan pidana antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan

tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyimpulkan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:¹

- a. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, yang menyebutkan bahwa :²

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya meyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Adapun menurut M. Sholehuddin yang mengemukakan bahwa :³

“Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**. (Bandung : Alumni. 2005). Hlm. 4.

² M. Taufik Makarao. **Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**. (Bandung : PT. Citra Adhya Bakti. 2005). Hlm. 16.

³ M. Sholehuddin. **Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana**. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004). Hlm. 59.

masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan Masyarakat/Negara, korban, dan pelaku”.

Lebih lanjut M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur-unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu :

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artinya bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Sementara itu Muladi mengemukakan tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu :⁴

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Memelihara solidaritas masyarakat;
- c. Pencegahan (umum dan khusus);
- d. Pengimbalan / pengimbangan.

Sementara H.R. Abdussalam,⁵ mengemukakan bahwa:

Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain: rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana.

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrech*

⁴Muladi. **Lembaga Pidana Bersyarat**. (Bandung : Alumni. 2004). Hlm. 11.

⁵H. R. Abdussalam. **Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)**. (Jakarta : Restu Agung. 2006). Hlm. 22.

(W.v.S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus disingkirkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.
- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi / resosialisasi.

2. Teori Pidana

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pidana terdapat beberapa teori⁶, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori *Absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- 1) Ditujukan pada penjahatnya;

⁶ Adami Chazawi. **Hukum Pidana Bagian I**. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008). Hlm. 157.

2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut subyektif dari pembalasan).

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

Sementara menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, mengenai teori absolut ini, bahwa :⁷

“pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan”.

Lanjut Muladi dan Barda Nawawi arif mengemukakan bahwa teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.

b. Teori *Relative* atau tujuan (*doel theorien*).

Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana sangat penting.

Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu :

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. **Teori-Teori Kebijakan Pidana**. (Bandung : Alumni. 1984). Hlm. 10.

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afsschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclas ering*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sedangkan pencegahannya dari teori ini, ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pencegahan Umum (*general preventie*)

Khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum agar setiap orang mengetahuinya.

Adanya ketentuan tentang ancaman pidana yang diketahui oleh umum itu membuat setiap orang menjadi takut melakukan kejahatan.

- 2) Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Menurut pandangan ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi kejahatan, dan mencegah orang-orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam wujud yang nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.

c. Teori Gabungan (*vermeegings theorien*).

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib masyarakat. Pidana dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pidana.

Teori gabungan dibedakan dalam 2 (dua) golongan besar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Sedangkan Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, mengemukakan teori tujuan pidana antara lain teori pembalasan (*retribution*), teori pencegahan (*deterrence*), teori rehabilitasi, teori integratif, bahkan muncul gerakan hendak menghapus pidana (*abolitionis*). Adapun uraian mengenai teori tujuan pidana tersebut, sebagai berikut :⁸

⁸ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety. **Pidana Penjara Mau Kemana**. (Jakarta : CV. Indhill Co. 2007). Hlm. 6.

a. Teori Retributif

Menurut teori pembalasan (*retribution theory*) alasan pembenar dalam penjatuhan hukuman, hukuman semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan jahat yang dilakukan. Hal ini menggambarkan, bahwa penjahat itu harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Teori ini berpandangan setiap orang itu dalam keadaan apapun juga dapat untuk berbuat sesuatu dengan keinginannya. Oleh karena itu ada alasan dilakukan pembalasan.

Dengan demikian, teori pembalasan ini tidak mempersoalkan penjatuhan hukuman berupa pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan, tetapi didasarkan adanya pelanggaran hukum, karena ini merupakan tuntunan keadilan. Oleh karena itu, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori Pencegahan

Menurut teori ini kejahatan tidak harus dijatuhi dengan suatu hukuman tetapi harus ada manfaatnya baik untuk si pelaku tindak pidana maupun masyarakat.

Hukuman diberikan bukan saja karena apa yang ditimbulkan si pelaku pada masa lalu, melainkan ada tujuan yang utama untuk masa depan. Sehingga hukum berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi, dan menakut-nakuti anggota masyarakat sehingga menjadi takut melakukan kejahatan. Bagi teori *utilitarian* hal yang utama adalah harus mencari suatu keseimbangan antara perlunya hukuman dengan biaya penghukuman. Kalau manfaatnya lebih besar, maka perlu suatu hukuman, bila efek penjeraan dari hukuman itu tidak ada, maka hukuman itu tidak perlu ada.

c. Teori Rehabilitasi

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada kegunaan tertentu. Di dalam penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, akan tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya seseorang ditempatkan dalam suatu tempat tertentu.

Dalam hal ini berarti, seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial dan dibiarkan di sana karena mereka diobati. Keberadaan seseorang yang direhabilitasi disebabkan adanya

kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai penyakit sosial yang disintegrative dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca sebagai simptom disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, *counseling*, latihan-latihan spiritual. Dipergunakannya metode seperti ini jelas menyerupai cara-cara tirani dan mengingkari hak asasi manusia. Sekali orang narapidana dirawat oleh dokter, maka tidak dapat diperkirakan kapan ia akan dinyatakan sembuh, dan manusia diperlakukan seperti “kelinci percobaan”.

d. *Abolitionis*

Gerakan *abolitionis* melihat ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai dari adanya sanksi berupa pidana penjara ternyata mendorong gerakan ini membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi pemikiran punitif. Dalam hal ini kelompok *abolitionis* ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat beradab, di samping karena dipandang kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat.

Dari pandangan kaum *abolitionis*, dapat dikatakan, bahwa hukuman bukanlah cara yang paling

efektif untuk menghadapi kejahatan. Hal ini cukup beralasan di mana kejahatan telah ada sebelum hukum pidana dibentuk. Sebagai pelaku kejahatan, dia bukanlah anggota masyarakat yang terasing. Gerakan *abolisionis* juga mengingatkan, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan semata-mata dikarenakan sistem peradilan pidana mengandung cacat, sehingga sistem peradilan pidana sendiri bersifat *kriminogen*.

e. Integratif

Teori integratif menempatkan pidana itu bukan semata-mata sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan, dalam hal ini fungsi pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat antara lain pidana untuk melindungi kepentingan hukum, masyarakat dan negara. Dalam hal ini, praktek penerapan hukum pidana tidak harus dengan pemanfaatan pidana sebagai sarana efektif menjerakan pelaku.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.⁹

Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.

Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.

2. Hak-Hak Narapidana

Mengenai Hak-Hak dari narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa :

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

⁹ Marini Mansyur. **Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar)**. (Makassar: Unhas Skripsi. 2011) Hlm. 14.

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan .(Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007) Pasal 1 ayat 2.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k UU Pemasyarakatan.

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PP No. 99 Tahun 2012, menyebutkan bahwa:

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat;
- 2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan;
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- 3) Pembebasan Bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- 4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan menteri;
- 5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- 6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri;

Pasal 1 angka 9

Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- 1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
 - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
 - d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- 2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- 3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 43B

- 1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- 2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keagamaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat;
- 3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- 5) Dalam hal batas waktu sebagai mana dimaksud pasal (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri;
- 6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat

Ketentuan mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat ini, dapat dilihat pada Pasal 5 sampai dengan pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut :

Pasal 5

Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pasal 6

- 1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - f. masa pidana yang telah dijalani untuk:
 1. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
 2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua

- pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
3. Cuti Menjelang Bebas, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 4. Cuti Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;
- 2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:
- a) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b) telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c) berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
 - d) masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e) berkelakuan baik;
 - f) masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
 1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
 - 1. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
 - 2. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 8

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:

- a. sejak ditahan;
- b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. perhitungan $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ masa pidana adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

Pasal 9

- 1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada:
 - a) Narapidana atau Anak Didik Pemasasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
 - b) Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- 2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

- 3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

D. Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Dalam penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, maka peranan Rutan sangatlah penting.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa:

Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Rutan dibentuk oleh Menteri di tiap Kabupaten dan Kotamadya yang juga berperan sebagai pelaksana asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan itu Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menuliskan bahwa :¹⁰

Pemasyarakatan adalah proses kehidupan negatif antara narapidana (unsur diri) masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan yang menjurus dan meznjelma sembuh menjadi kehidupan yang positif antara narapidana dengan unsur-unsur diri masyarakat.

Pada prinsipnya tidak ada lagi penjara karena perkembangan Rutan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan.

¹⁰ Romli Atmasasmita. **Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia**. (Bandung : Alumni. 1975). Hlm. 59.

Ketika dijatuhi vonis dan ditetapkan melanggar hukum, maka pemulihan yang harus dilakukan harus berada dilingkungan yang layak. Sehingga narapidana menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan). Rutan harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika narapidana kembali ke masyarakat akan bias mematuhi nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali.

Bagi para narapidana yang ditempatkan (dibina) di Rutan adalah Narapidana yang masa pidananya tidak lebih dari 12 bulan (1 tahun), ketentuan ini didasari oleh para aparat. Secara realitasnya masih ditemukan adanya narapidana dengan masa pidana lebih dari 12 bulan yang ditempatkan dalam Rutan untuk dibina. Alasan pembenar ini dilandasi oleh segi finansial untuk pengadaan Lapas di setiap kabupaten. Padahal bila kita menyimak ketentuan Pasa 4 ayat (1) UU Pemasyarakatan secara tegas berbunyi :

“LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota dan kabupaten atau kota madya”.

Hal ini menandakan bahwa realisasi dari ketentuan UU Pemasyarakatan itu sendiri telah terabaikan sehingga tidak dapat disalahkan ketika banyak orang melihat bahwa hukum itu hanyalah sesuatu yang tertulis semata dan tidak memiliki ruang (mati). Akan tetapi dengan pemberdayaan sarana yang ada di Rutan, tetap diupayakan secara maksimal dengan melakukan pembinaan agar narapidana dapat melakukan interaksi secara sehat sehingga *output*

dari itu untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dapat terwujud. Hal ini didasari pada ketentuan UU Pemasyarakatan dalam Pasal 3 yaitu:

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Hampir tidak ada yang membedakan antara tugas pokok Lapas dengan Rutan, hanyalah persoalan penempatan tahanan yang menjadi tolak ukur perbedaannya. Tugas dari Rutan adalah melakukan pelayanan dan melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan tahanan. hal ini merupakan penjabaran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985 dimana diuraikan fungsi-fungsi Rutan adalah:

1. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
3. Memberikan bimbingan bagi tahanan.

Surat keputusan Menteri Kehakiman yang disebutkan diatas, semakin diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 yang mana disebutkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan narapidana dan pelayanan bagi tahanan terletak pada konsistensi aparaturnya dalam menerapkan sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya yaitu :

1. Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak didik.

2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tertib Rutan
5. Melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga.

Rutan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan, agar para narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya di masyarakat melalui peran aktif mereka dalam pembangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Tana Toraja, khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale. Pada instansi tersebut Penulis dapat memperoleh data yang akurat karena memiliki kompetensi terkait objek penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data atau informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale.

2. Penelitian Kepustakaan (*Librang Research*)

Data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data yang bersumber dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale.

C. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak terkait, Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data yang bersumber dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Analisis Data

Data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder diolah dengan menafsirkan gejala dalam hubungannya dengan landasan teori dan landasan yuridis digunakan analisis kualitatif dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata. Dimana sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Rumah Tahanan Negara Klas II B Makale

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Makale adalah salah satu unit pelaksana teknis bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan yang bertanggung jawab kepada Kanwil Departemen Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan.

Sejak dibangun, Rutan Klas II B Makale hanya difungsikan sebagai tempat penahanan para tahanan. Namun sejak adanya Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06, tentang pengalihan fungsi Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan yaitu Rutan dapat beralih fungsi sebagai Lapas dan begitupun sebaliknya. Dengan demikian Rutan di Makale bisa difungsikan sebagai tempat penahanan Narapidana.

Rutan Klas II B Makale terletak di kota Makale yang berada di wilayah Kecamatan Makale tepatnya di Jln. Ampera no.6 Makale. Rutan Klas II B Makale yang dibangun di atas tanah seluas 1.720 meter persegi yang didesain sedemikian rupa dengan tetap mempertimbangkan segi keamanan dan pembinaan. Dari segi kapasitas Rutan Klas IIB Makale hanya dapat menampung 47 narapidana/tahanan yang dibagi kedalam 12 kamar. Jumlah penghuni Rutan Klas II B Makale sampai dengan tahun ini sudah sangat

melampaui batas dari kapasitas Rutan Makale. Pada saat ini Rutan Klas II B Makale dihuni 102 tahanan dan narapidana, yang terdiri dari 63 tahanan dan 39 narapidana. Secara geografis RUTAN Klas II B Makale mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan pemukiman penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kantor Dinas Perikanan dan Peternakan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan pemukiman penduduk.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidan dan warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalani ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Adapun visi dan misi Rumah Tahan Klas IIB Makale

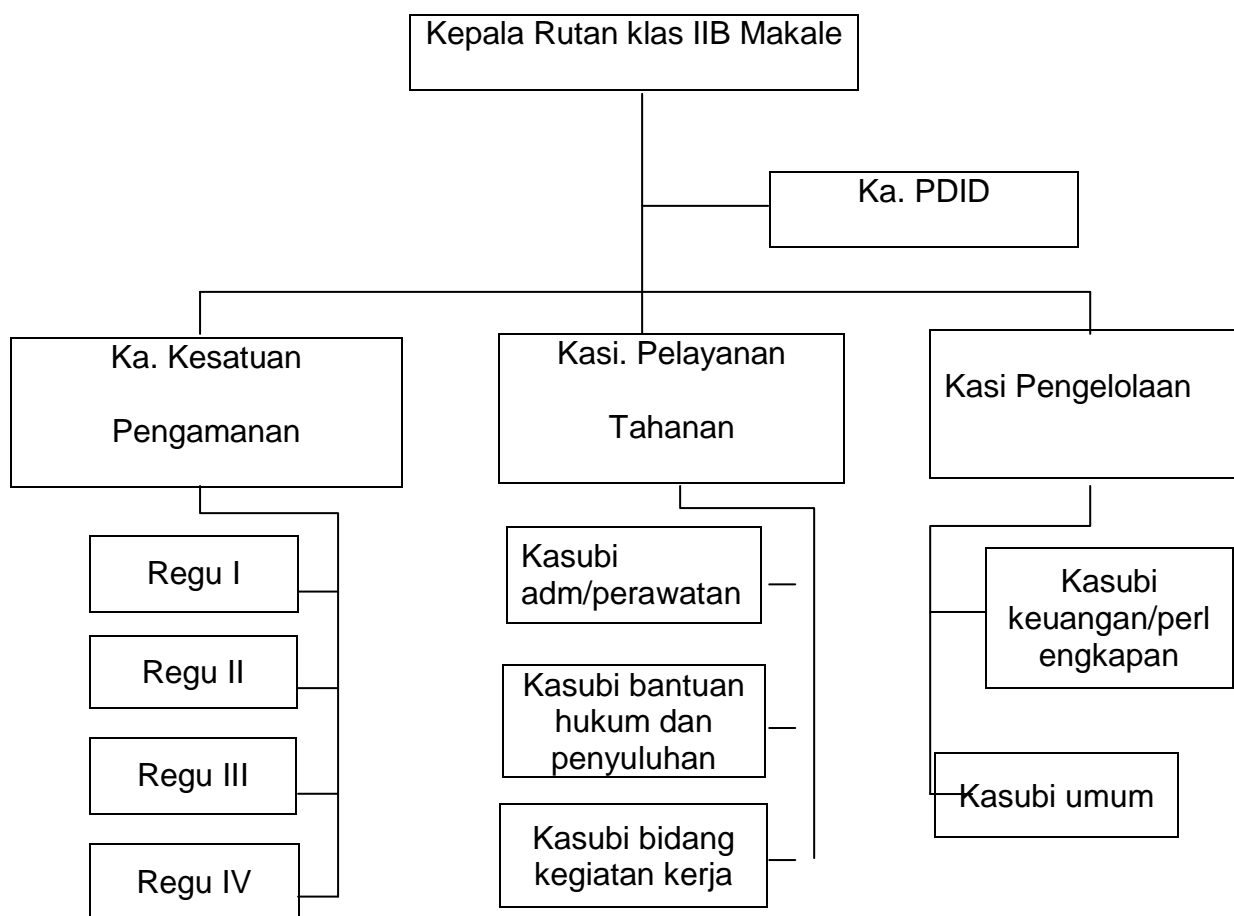
Visi :

Terwujudnya Rumah Tahan Negara Klas IIB sebagai lembaga pelayanan tahanan serta pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Misi :

Melakukan pelayanan tahanan serta pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Adapun struktur organisasi Rumah tahanan klas IIB Makale



B. Proses Pengusulan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Pembebasan Bersyarat merupakan Hak bagi setiap narapidana hanya saja hak tersebut tidak mutlak harus dipenuhi, mengingat pemberian pembebasan bersyarat haruslah dapat mencerminkan rasa

keadilan di masyarakat terutama bagi pihak korban. Seorang narapidana sebelum diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik persyaratan substantive maupun persyaratan administratif.

Seorang narapidana sebelum diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat haruslah memenuhi tahap-tahap pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana)

Pada tahapan ini narapidana mulai mengenal lingkungan kehidupan di lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dan warga masyarakat di lingkungan tersebut dan wajib melaksanakan program pembinaan seperti olahraga serta pembinaan keagamaan dan pengawasan dilaksanakan secara *security maximum*.

2. Program Pertama (1/3-1/2 masa pidana)

Pada tahap ini narapidana selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga, narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang bersifat produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa dan karya tersebut.

3. Program kedua (1/2-2/3 masa pidana)

Pada tahapan ini narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.

4. Program ketiga (2/3-selesai masa pidana)

Pada tahapan inilah apabila seorang narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Adapun prosedur awal dalam mengajukan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yaitu :

- 1) Surat dari Kejaksaan
- 2) Litmas (Penelitian Kemasyarakatan)
- 3) Salinan register F
- 4) Daftar perubahan (daftar yang dicantumkan apabila ada perubahan masa hukuman bagi narapidana seperti remisi)
- 5) Surat pernyataan dari keluarga
- 6) Surat pernyataan dari kelurahan atau pemerintah setempat
- 7) Hasil sidang Pengadilan
- 8) Hasil siding TPP (tim pengamat pemasyarakatan)
- 9) Risalah singkat pembinaan narapidana
- 10) Surat keterangan dokter

Secara garis besar narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi, adapun syarat yang dimaksud :

1. Syarat-syarat umum meliputi:
 - a. Narapidana harus berkelakuan baik
 - b. Narapidana tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter

2. Syarat-syarat khusus meliputi :

Telah menjalani dua per tiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan.

Disamping dibutuhkan kedua syarat tersebut diatas, seorang narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5-9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut

Pasal 5

Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pasal 6

- 1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;

- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 - 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 - 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - f. masa pidana yang telah dijalani untuk:
 - 1. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
 - 2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - 3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 - 4. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;
- 2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:
- a) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b) telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c) berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
 - d) masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e) berkelakuan baik;
 - f) masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
 - 1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - 2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
 1. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
 2. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 8

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:

- a. sejak ditahan;

- b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. perhitungan $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ masa pidana adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

Pasal 9

- 1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada:
 - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
 - b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- 2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan pencekalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Setelah semua prosedur telah dilalui maka apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui usulan pembebasan bersyarat tersebut, keputusan mengenai pembebasan bersyarat dibuat oleh Direktur Jendral Pemasarakatan. Surat keputusan tersebut selanjutnya dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat. Tembusan surat keputusan itu selanjutnya dikirimkan kepada :

1. Kepala kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kakanwil)
2. Kepala Balai Pemasarakatan (BAPAS)

3. Walikota/Bupati dimana narapidana menjalani pembebasan bersyarat.

Narapidana yang memperoleh izin untuk menjalani pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan yang ditetapkan baginya dan harus mentaati syarat-syarat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya izin untuk menjalani pembebasan bersyarat. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan yang ada dalam pasal 15b KUHP bahwa :

1. Jika orang yang diberikan pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal diatas dilakukan, maka menteri kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
2. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
3. Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang telah ditentukan, maka sambil menunggu keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya selama 60 (enam puluh) hari. Jika waktu telah lewat dan belum keluar keputusan tersebut maka terpidana harus dikeluarkan dari tahan.

C. Pelaksanaan Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Makale.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak F.K Sarapang selaku Ketua PDID (Pengelolah Data Informasi dan Dokumentasi) Rumah Tahanan Klas II B Makale, pada hari kamis tanggal 20 Juni 2013, beliau menyatakan bahwa Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (Sembilan) bulan dengan ketentuan narapidana telah memenuhi segala persyaratan yang diberikan.

Dalam melaksanakan pembebasan bersyarat kepada narapidana di dalam Rumah Tahanan diberikan bimbingan yang dilaksanakan oleh pembimbing/petugas Rumah Tahanan. Bimbingan ini adalah sebagai persiapan untuk mengusahakan pembebasan bersyarat dan bimbingan ini dilaksanakan di dalam maupun di luar Rumah Tahanan. Bimbingan di dalam Rumah Tahanan diarahkan sesuai dengan sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenal arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, binaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Dapat

berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak F.K Sarapang selaku Ketua PDID (Pengelola Data Informasi dan Dokumentasi) Rumah Tahanan Klas II B Makale di Rumah Tahanan Klas II B Makale beliau menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dibentuk sebuah tim yang dinamakan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk melakukan penilaian terhadap warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk diberikan usulan mendapatkan pembebasan bersyarat, dimana tim tersebut dibentuk oleh kepala RUTAN yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai ketua, 2 (dua) orang sebagai anggota.

Penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) berlangsung selama narapina menjalani hukumannya. Apabila narapidana selama menjalani pidananya di Rumah Tahanan berkelakuan baik, memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat maka dapat diajukan pengusulan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kamal Yahya, Spd (Kasi Pelayanan Tahanan RUTAN Klas IIB Makale pada tanggal 21 juni 2013) mengemukakan terdapat tahapan-tahapan pemberian pembebasan bersyarat sebagai berikut :

- a. Tahap pertama (0-1/3 masa pidana), Pada waktu narapidana masuk di RUTAN Klas IIB Makale harus diketahui dahulu apa kekurangan-kekurangan/kelebihan-kelebihannya, sebab-sebab sampai melakukan kejahatan. Dengan mengetahui perilaku narapidana maka Pembina merencanakan pembinaan yang sesuai dengan narapidana terutama pembinaan pendidikan dan bimbingan. Pada tahap ini proses pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana agar narapidana siap untuk hidup dengan masyarakat luar. Tahap ini sering juga disebut sebagai *security maximum* (proses pembinaan).
- b. Tahap kedua (1/3-1/2 masa pidana), merupakan tahap lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal, Pada tahap ini narapidana selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga, narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang bersifat produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa dan karya tersebut.
- c. Tahap ketiga (1/2-2/3 masa pidana), Pada tahapan ini narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.

d. Tahap keempat (2/3 masa pidana), Pada tahapan inilah apabila seorang narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Setelah narapidana menjalani tahapan-tahapan diatas maka masih diperlukan lagi pertimbangan-pertimbangan dari instansi-instansi yang terkait dengan pembebasan bersyarat, instansi-instansi tersebut adalah :

1. Pemerintah Daerah setempat;
2. Kepolisian;
3. Kejaksaan Negeri;
4. Pengadilan Negeri; dan
5. Balai Pemasyarakatan.

Dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat narapidana harus mengisi surat pernyataan yang diisi oleh keluarga dari narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang dijadikan penjamin dari narapidana itu sendir. Selain keluarga yang boleh menjadi penjamin adalah Lembaga/Badan ataupun Organisasi Sosial.

Untuk melaksanakan pemberian pembebasan bersyarat maka kelengkapan berkas usulan narapidana yang diberikan Pembina/petugas RUTAN Klas IIB Makale, berupa :

1. Kutipan Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri Makale.
2. Berita acara Pelaksanaan putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri Makale.
3. Surat keterangan tidak mempunyai perkara lain dari Kejaksaan Negeri Makale.
4. Laporan penelitian Kemasyarakatan.
5. Kartu pembinaan.
6. Daftar perhitungan Tahap pembinaan.
7. Ringkasan daftar register F.
8. Daftar perubahan
9. Surat keterangan kesehatan dari dokter.
10. Surat pernyataan dari keluarga narapidana.
11. Hasil siding Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Adapun Proses pengajuan pembebasan bersyarat di RUTAN Klas IIB Makale adalah sebagai berikut :

- 1) Tim Pengamat Pemasyarakatan setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan dari BAPAS, kemudian Tim Pengamat Pemasyarakatan mengusulkan kepada kepala RUTAN Klas IIB Makale.

- 2) Kepala RUTAN Klas IIB MAKale segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut, apabila menyetujui usulan tersebut maka Tim Pengamat Pemasyarakatan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.
- 3) Kepala kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala RUTAN Klas IIB Makale tersebut dan setelah itu memperhatikan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, maka Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dapat menyatakan:
 1. Menolak usul Kepala RUTAN Klas IIB Makale tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasannya kepada Kepala RUTAN Klas IIB Makale.
 2. Menyetujui usul Kepala RUTAN Klas IIB Makale dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera meneruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera meneliti dengan mempelajari usulan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyatakan :

1. Menolak usul Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan menyampaikan surat penolakan disertakan alasan kepada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala RUTAN Klas IIB Makale.
2. Menyetujui usul Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan segera menerbitkan keputusan pembebasan bersyarat.

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari dokumen Rumah Tahanan Klas IIB Makale, penulis mendapatkan jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pemberian Pembebasan Bersyarat Rumah Tahan Klas
IIB Makale priode tahun 2011.

Bulan	Diusulkan	Realisasi
Februari	2 Narapidana	2 Narapidana
Maret	1 Narapidana	1 Narapidana
Agustus	4 Narapidana	3 Narapidana
Oktober	2 Narapidana	2 Narapidana
Jumlah	9 Narapidana	8 Narapidana

Sumber data sekunder : Rutan Klas IIB Makale, 2013

Berdasarkan data pada table 1 dapat kita ketahui jumlah narapidana yang diusulkan mendapatkan pembebasan bersyarat pada periode tahun 2011 adalah berjumlah 9 (Sembilan) narapidana dan terrealisasi sebanyak 8 (delapan) narapidana.

Tabel 2. Pemberian Pembebasan Bersyarat Rumah Tahanan
Klas IIB Makale Priode Tahun 2012.

Bulan	Diusulkan	Realisasi
Februari	1 Narapidana	1 Narapidana
Maret	2 Narapidana	2 Narapidana
Agustus	5 Narapidana	5 Narapidana
November	3 Narapidana	3 Narapidana
Jumlah	11 Narapidana	11 Narapidana

Sumber data sekunder : Rutan Klas IIB Makale, 2013

Berdasarkan data dari table 2 (dua) dapat kita ketahui jumlah

narapidana yang diusulkan mendapat pembebasan bersyarat pada periode tahun 2012 adalah berjumlah 11 (sebelas) narapidana dan terrealisasi sebanyak 11 (sebelas) narapidana.

Tabel 3. Pemberian Pembebasan Bersyarat Rumah Tahanan
Klas IIB Makale priode januari 2013-mei 2013.

Bulan	Diusulkan	Realisasi
Januari	3 Narapidana	3 Narapidana
Maret	1 Narapidana	1 Narapidana
April	1 Narapidana	1 Narapidana
Mei	1 Narapidana	1 Narapidana
Jumlah	6 Narapidana	6 Narapidana

Sumber data sekunder : Rutan Klas IIB Makale, 2013

Berdasarkan data dari table 2 dapat kita ketahui jumlah narapidana yang diusulkan mendapat pembebasan bersyarat pada periode Januari 2013-Mei 2013 adalah berjumlah 6 (enam) narapidana dan terrealisasi sebanyak 6 (enam) narapidana.

D. Faktor-faktor yang Menghambat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Makale

Dalam kesempatan ini penulis diberikan kesempatan oleh petugas Rumah Tahanan untuk melakukan wawancara dengan beberapa narapidana yang sementara dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut :

1. Panggara Toding mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi selama menunggu mendapatkan pembebasan bersyarat adalah jika melanggar disiplin atau tata tertib di Rumah Tahanan seperti berkelahi sesama narapidana maka haknya mendapat pembebasan bersyarat akan dibatalkan.
2. Mika Ato mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat adalah banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Klas IIB Makale sudah berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Klas IIB Makale,

1. Kualitas dan Kuantitas petugas

Dalam proses pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat keterbatasan dalam jumlah petugas merupakan salah satu kendala untuk melakukan pembinaan kepada narapidana serta masih kurangnya kualitas petugas dalam hal pengetahuan dalam pembinaan narapidana.

2. Faktor Administrasi

Terlalu banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat serta dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat keputusan terkonsentrasi dipusat yaitu Dirjen Pemasyarakatan menyebabkan terlambatnya proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Salah satu penunjang keberhasilan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kekurangan sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan. Sekiranya sarana dan prasarana menjadi salah satu prioritas agar dalam pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale hendaknya memelihara semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakan secara optimal.

4. Faktor Keluarga

Kurangnya keluarga narapidana yang menjamin narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat, karena keluarga narapidana masih takut jika narapidana mengulangi lagi tindak pidana.

5. Faktor warga masyarakat

Masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap warga binaan, sehingga pihak pemerintah setempat terkadang menolak warga binaan untuk melakukan pembebasan bersyarat, karena dapat membuat masyarakat merasa tidak aman jika warga binaan melakukan Pembebasan bersyarat.

6. Faktor pendidikan dan Bahasa

Faktor pendidikan dan bahasa merupakan salah satu faktor penghambat dalam melakukan pembinaan. Petugas terkadang kesulitan dalam menyampaikan atau memberi informasi kepada narapidana karena tidak menguasai bahasa Indonesia.

7. Faktor disiplin

Bagi narapidana yang melanggar disiplin atau melakukan pelanggaran dalam Rumah Tahanan dapat menyebabkan narapidana tersebut gagal mendapat pembebasan bersyarat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pemenuhan hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Klas IIB Makale, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Tahapan dalam pemberian pembebasan bersyara terdiri dari 4 (empat) tahap :
 - a. Tahap pertama (0-1/3 masa pidana), Pada waktu narapidana masuk di RUTAN Klas IIB Makale harus diketahui dahulu apa kekurangan-kekurangan/kelebihan-kelebihannya, sebab-sebab sampai melakukan kejahatan. Dengan mengetahui perilaku narapidana maka Pembina merencanakan pembinaan yang sesuai dengan narapidana terutama pembinaan pendidikan dan bimbingan. Pada tahap ini proses pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana agar narapidana siap untuk hidup dengan masyarakat luar. Tahap ini sering juga disebut sebagai security maximum (proses pembinaan).
 - b. Tahap kedua (1/3-1/2 masa pidana), merupakan tahap lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal, Pada

tahap ini narapidana selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga, narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang bersifat produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa dan karya tersebut.

c. Tahap ketiga (1/2-2/3 masa pidana), Pada tahapan ini narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.

d. Tahap keempat (2/3 masa pidana), Pada tahapan inilah apabila seorang narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Rumah Tahanan Kelas IIB Makale :

a. Keterbatasan dalam jumlah petugas merupakan salah satu kendala untuk melakukan pembinaan kepada narapidana serta masih kurangnya kualitas petugas dalam hal pengetahuan dalam pembinaan narapidana.

- b. Terlalu banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat serta dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat keputusan terkonsentrasi dipusat yaitu Dirjen Pemasyarakatan menyebabkan terlambatnya proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan.
- d. Kurangnya keluarga narapidana yang menjamin narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat, karena keluarga narapidana masih takut jika narapidana mengulangi lagi tindak pidana.
- e. Masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap warga binaan, sehingga pihak pemerintah setempat terkadang menolak warga binaan untuk melakukan pembebasan bersyarat, karena dapat membuat masyarakat merasa tidak aman jika warga binaan melakukan Pembebasan bersyarat.
- f. Faktor pendidikan dan bahasa merupakan salah satu faktor penghambat dalam melakukan pembinaan. Petugas terkadang kesulitan dalam menyampaikan atau

memberi informasi kepada narapidana karena tidak menguasai bahasa Indonesia.

- g. Bagi narapidana yang melanggar disiplin atau melakukan pelanggaran dalam Rumah Tahanan dapat menyebabkan narapidana tersebut gagal mendapat pembebasan bersyarat.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan :

1. Perlunya sosialisasi kepada seluruh narapidana agar mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat, diperlukan juga sosialisasi kepada keluarga narapidana sebagai penjamin narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat.
2. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya pembebasan bersyarat, terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat.
3. Untuk menunjang profesionalisme dan kualitas perlu ditingkatkan juga kesejahteraan pegawai/petugas Rumah Tahanan agar tidak terjadi kejenuhan dan dapat meningkatkan kinerja pegawai/petugas Rumah Tahanan.
4. Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2008. ***Hukum Pidana Bagian I***. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- H. R., Abdussalam. 2006. ***Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)***. Jakarta : PT. Restu Agung.
- Marini Mansyur. 2011. ***Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar)***. Makassar: Unhas Skripsi.
- Muladi. 2004. ***Lembaga Pidana Bersyarat***. Bandung : Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief.1984. ***Teori-Teori Kebijakan Pidana***. Bandung : Alumni.
- _____. 2005. ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***. Bandung : Alumni.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety. 2007. ***Pidana Penjara Mau Kemana***. Jakarta : CV. Indhill Co.
- Romli Atmasasmita. 1975. ***Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia***. Bandung : Alumni.
- Sholehuddin, M. 2004. ***Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana***. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Taufik. Makarao. M. 2005. ***Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia***. Bandung : PT. Citra Adtya Bakti. 2005.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas

PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.2.PK.04-10

Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10

Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.